

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DI DESA LASORI KECAMATAN MAWASANGKA TIMUR
KABUPATEN BUTON TENGAH**

La Ode Raffjany Rangsha Vany^{1(a)}, Nastia^{2(b)}, Muh. Askal Basir^{3(c)}

*^{1,2,3}Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton
^{a)}askalbasir16@gmail.com*

**INFORMASI
ARTIKEL**

Article History:

Dikirim:

12-08-2022

Diterbitkan Online:

31-12-2022

Kata Kunci:

Peran, Pemerintah Desa,
SDM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten buton tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Studi Kepustakaan. Teknik Analisis data dalam penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dalam Penelitian adalah Peran Pemerintah di Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten buton tengah dalam Mengembangkan SDM antara lain: 1) Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Berkaitan dengan pengembangan SDM pemerintah desa memfasilitas masyarakat pelatihan mengadakan pelatihan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang baik dan memiliki daya saing; Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pembangunan.; Pemerintah sebagai Motivator, dalam membentuk masyarakat yang patuh dan taat pada peraturan, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar dapat memberikan motivasi kepada Masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemauan dalam ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan.

Keywords:

*Role, Village Government,
Human Resources*

Corresponding Author:

askalbasir16@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is the role of the village government in developing human resources in Lasori Village, East Mawasangka District, Central Buton Regency. The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques namely Observation, Interview, Documentation and Literature Study. Data analysis techniques in research are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results obtained in this study are the role of the government in Lasori Village, Mawasangka Timur District, Central Buton Regency in developing human resources, including: 1) The government as a facilitator is to create conducive conditions for the implementation of development in order to bridge various community interests in optimizing regional development. With regard to human resource development, the village government facilitates the training community to conduct training, so that the community has good skills and has competitiveness; The government's role as a regulator is to prepare directives to balance the implementation of development through the issuance of regulations. As a regulator, the government provides a basic reference to the community as an instrument to regulate all development implementation activities; The government as a motivator, in forming a society that is

obedient and obedient to regulations, the role of local government is needed as a motivator so that it can provide motivation to the community so that people have the will to obey and comply with regulations.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i4.494>

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya. Sebagai unit terbawah dari sebuah sistem pemerintahan nasional, pemerintah desa diperhadapkan pada kondisi yang sangat sulit sebagai imbas dari adanya perubahan paradigme pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik. Kuensekuensi logis yang menyertai diberlakukannya undang-undang tersebut, harus dipersiapkan oleh setiap pemerinrah, mulai dari pemerintah (pusat) harus bersedia memfasilitasi setiap perubahan sebagai tuntutan implementasi UU tersebut yang terjadi ditingkat pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten dan kota) bahkan pada strata pemerintahan desa, dan disisi yang lain, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) dan pemerintah desa berkewajiban mempersiapkan diri untuk melakukan penataan atas tuntutan perubahan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan hak otonomi daerah (termasuk otonomi asli desa).

Salah satu unsur penting yang mendesak untuk segera dipersiapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi desa adalah aparat pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang aparatur Desa yang menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan yang selama ini terkesan masih relatif rendah.

Rendahnya kompetensi peJuni ntah desa diindikasikan dengan masih banyaknya tuntutan dan keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, seperti kurang mampu mengoprasikan alat elektronik,

kurangnya pengalaman di bidangnya, kurang paham dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan. Permasalahan yang didapat berdasarkan pendapat dari para warga masyarakat yang hendak mengurus surat kependudukan, surat-surat tanah, keterangan lahir dan lain-lain.

Kondisi ini berlaku hampir disemua desa dalam wilayah Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah sebagai lokasi penelitian ini. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah kemampuan yang dimiliki pemerinta desa itu sendiri, seperti tingkat pendidikan formal, pelatihan/keterampilan atau pendidikan nonformal, pengalaman dan sikap dalam menjalankan tugasnya itu masih kurang berdasarkan pengamatan peneliti sebelumnya dan itu merupakan faktor-faktor yang turut menentukan sejauhmana kompetensi aparat pemerintah desa itu sendiri.

Dalam mencapai tujuan organisasi maka pemerintah desa yang ada di Kantor Desa Singki harusnya mempunyai keahlian yang cukup baik dalam memenuhi kewajibannya. Melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut sangat dibutuhkan pemerintah desa atau petugas yang benar-benar menguasai bidangnya dan bertanggung jawab.

Peran pemerintah desa menurut Surasih dalam (Malani et al., 2021). Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah desa mengarahkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang adil dan bertanggung jawab. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tugas pemerintah adalah melaksanakan pembangunan disegala bidang termasuk didalamnya pembangunan fisik desa. Untuk memperjelas tentang apa yang dimaksud dengan pembangunan fisik desa, maka terlebih dahulu penulis akan mengutip pendapat para ahli:

Menurut Sumitro dalam (Hariyanto, 2021), pembangunan didefinisikan sebagai berikut pembangunan adalah segala usaha baik dari pemerintahan maupun swasta yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan penduduk sehingga dapat memenuhi kebutuhannya secara layak. Pemerintah desa juga sangat bertanggung jawab dalam pembangunan di Desa demi terciptanya kemakmuran agar tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Maka peran pemerintah yang dimaksud juga dalam hal ini ialah pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Pemerintah juga sebagai dinamisator yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat agar terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Dan yang terakhir peran pemerintah juga sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjebat berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan di daerah pedesaan merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tolgak strategis dalam pembangunan desa.

Dalam peran pemerintah desa juga dalam memberdayakan masyarakat meliputi tiga hal yaitu, pembinaan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat dan pengembangan terhadap masyarakat. ketiga variable tersebut harus dijalankan secara maksimal agaupaya apa yang di rencanakan dapat berjalan dengan baik dan yang diharapkan. Upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, perlu kiranya diketahui perkembangan pembangunan di daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah karena walau bagaimanapun peran pemerintah dalam pembangunan yang selama ini tidak lepas dari peran masyarakat maka keberadaan masyarakat juga tidak hanya dipandang sebelah mata dalam hidup bermasyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Hal tersebut merupakan konsekuensi Kepala desa sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa, terlebih lagi bahwa pemerintah Desa merupakan organisasi pemerintah terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Mengingat peningkatan pelayanan masyarakat telah menjadi bagian utama

tanggung jawab pemerintah khususnya pada pamerintahan Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten buton tengah.

Maka dengan demikian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat peran Kepala Desa dituntut sekurangnya-kurangnya dapat menjadi sebagai fasilitator, regulator, dan motivator didalam organisasi pemerintahan yang dipimpinnya. Pertama, peran kepala desa sebagai fasilitator yang dimaksudkan agar kepala desa dapat memberikan fasilitas seperti dalam bentuk pelatihan khusus dengan kurun waktu yang telah ditentukan kepada pegawai demi menunjang peningkatan pelayanan masyarakat. Kedua, peran kepala desa sebagai regulator dimaknai bahwa kepala desa sebagai pengatur atau dengan kata lain kepala desa sebagai penentu kebijakan dalam roda pemerintahan di desa khususnya kebijakan yang berkaitan dengan peningkatkan pelayanan masyarakat. Ketiga, peran kepala desa sebagai motivator mengandung arti bahwa kepala desa harus menjalin komunikasi yang aktif terhadap bawahannya agar tidak terjadi kesenjangan antara atasan dalam hal ini kepala desa dengan bawahannya maupun masyarakat secara langsung dalam rangka peningkatan pelayanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena dengan metode penelitian kualitatif nantinya akan mampu menganalisis gejala sosial yang ada dalam masyarakat secara langsung dari narasumber, dan tidak hanya mencari apa yang harus dibenarkan dan banyaknya data yang dikumpulkan, akan tetapi lebih pada ketertarikan bentuk nyata secara ilmiah hasil dari penelitian tersebut. Menurut Salim dan Syahrudin dalam (Fadli, 2021). apapun model yang dipilih, hal terpenting yang harus dimiliki periset kualitatif adalah keterampilan kreativitas dan kekuatan improvisasi dalam melakukan wawancara. Disamping itu periset juga dituntut untuk menunjukkan sikap yang fleksibel, objektif dan tidak cenderung mengadili. Pokok-pokok dari wawancara biasanya berkenaan dengan tiga tema yakni tingkah laku, sistem nilai dan perasaan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Di Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten

buton tengah dalam Mengembangkan SDM antara lain

Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Berkaitan dengan pengembangan SDM pemerintah desa memfasilitas masyarakat pelatihan mengadakan pelatihan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang baik dan memiliki daya saing. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa Lasori telah melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator dalam upaya meningkatkan SDM dengan mamfasilitasi masyarakat melalui pelatihan guna meningkatkan kemampuan masyarakat.

Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam mengembangkan SDM, Pemerintah desa Lasori akan menyiapkan aturan melalui Peraturan Desa sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pemerintah sebagai Motivator

Motivator, dalam membentuk masyarakat yang patuh dan taat pada peraturan, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar dapat memberikan motivasi kepada Masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemauan dalam ketaatan dan kepatuham terhadap peraturan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa Lasori telah melaksanakan tugasnya sebagai motivator dalam upaya mengembangkan SDM masyarakat desa Lasori

PENUTUP

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Peran Pemerintah Di Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten buton tengah

dalam Mengembangkan SDM antara lain: 1) Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Berkaitan dengan pengembangan SDM pemerintah desa memfasilitas masyarakat pelatihan mengadakan pelatihan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang baik dan memiliki daya saing; Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pembangunan.; Pemerintah sebagai Motivator, dalam membentuk masyarakat yang patuh dan taat pada peraturan, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar dapat memberikan motivasi kepada Masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemauan dalam ketaatan dan kepatuham terhadap peraturan

DAFTAR PUSTAKA

- Affila, A. (2020). Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Reformasi Hukum Administrasi Negara. *Citra Justicia : Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*. <https://doi.org/10.36294/cj.v21i2.970>
- Ardianto, Y. (2019). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. In *Djkn*.
- Arifin, S. R., & Haryanto, R. (2021). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Penguatan Ekonomi. *Kinerja*, 18(3), 425–430.
- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta.
- Artini, Y. D. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Berbasis Kompetensi sebagai Strategi Membangun Organisasi Kompetitif. In *Efisiensi - Kajian Ilmu Administrasi* (Vol. 11, Issue 2). <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v11i2.3989>

- Efendi, N. (2015). Pengembangan Sumberdaya Manusia Berbasis Kompetensi di Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(1), 1. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i1.839>
- Enggraini. (2020). Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Memajukan Desa Pongok-Polanharjo, Klaten. *Matra Pembaruan*. <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.71-82>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Kusuma, F. K. (2021). Impelementasi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Berbasis Kompetensi di Era Digital. *Media Bina Ilmiah*, 15(10), 5579–5590. <http://ejournal.binawakya.or.id/index.php/MBI>
- Malani, L. F., Tumengkol, S. M., & Lumintang, J. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Holistik*, 14(1), 1–17. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/32689>
- Nara, D. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Bandung. *Ji@P*.
- Panjaitan, E., Dewi, R., & Angelia, N. (2019). Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. *Perspektif*, 8(1), 32. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i1.2543>
- Raintung, A. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 1, No.2(2), 1–9.
- Saksono, H. (2020). Innovation Hub: Media Kolaborasi Menuju Pemerintahan Daerah Inovatif. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7854>
- Simanjuntak, F., & Sariffuddin, S. (2017). Peran Local Champion Dalam Pengembangan Community Based Tourism Di Desa Wisata Candirejo, Magelang. *Jurnal Pengembangan Kota*. <https://doi.org/10.14710/jpk.5.2.190-199>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=sow_detail&id=43
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Widjaja, Y. R., Alamsyah, D. P., Rohaeni, H., & Sukajie, B. (2018). Peranan Kompetensi SDM UMKM Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor, Sumedang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 465–476.